



Pendidikan Demokrasi di Sekolah Sebagai Sarana Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Kelas XII di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya

Valentino Tabang¹, Robi Yolanda², Dotrimensi³, Ronald Hadibowo Sangalang⁴

^{1,2,3,4}Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail: valentinotabang@gmail.com, robbyyld@gmail.com, dotrimensi@fkip.upr.ac.id, ronalddhadibowo@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-04-15 Revised: 2025-05-21 Published: 2025-06-09	Democracy education in schools has a strategic role in increasing the political awareness of novice voters, especially class XII students at SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. This study aims to evaluate the implementation of democracy education in schools as a means of forming beginner voters who have political awareness and are able to actively participate in the democratic process. The method used is descriptive qualitative with a case study approach, through in-depth interviews, observation of Civics learning activities, and analysis of student participation in the 2024 elections. The results showed that although the school has made various efforts, such as democracy seminars and the 'KPU Goes to School' programme, the participation of novice voters is still low. The main factors affecting low participation are limited access to polling stations and a lack of understanding of the importance of votes in elections. Therefore, more effective strategies are needed, such as election simulations, candidate debates, and integration of democracy education into the curriculum and extracurricular activities. Comprehensive democracy education is expected to form students who are more politically aware and ready to participate in Indonesia's democratic life.
Keywords: <i>Democracy Education;</i> <i>First-Time Voters;</i> <i>Political Awareness;</i> <i>Political Participation;</i> <i>School.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-04-15 Direvisi: 2025-05-21 Dipublikasi: 2025-06-09	Pendidikan demokrasi di sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula, terutama siswa kelas XII di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pendidikan demokrasi di sekolah sebagai sarana dalam membentuk pemilih pemula yang memiliki kesadaran politik dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan pembelajaran PKn, serta analisis partisipasi siswa dalam pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sekolah telah melakukan berbagai upaya, seperti seminar demokrasi dan program "KPU Goes to School", partisipasi pemilih pemula masih rendah. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi adalah keterbatasan akses ke TPS dan kurangnya pemahaman akan pentingnya suara dalam pemilu. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti simulasi pemilu, debat kandidat, serta integrasi pendidikan demokrasi ke dalam kurikulum dan ekstrakurikuler. Pendidikan demokrasi yang komprehensif diharapkan dapat membentuk siswa yang lebih sadar politik dan siap berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Kata kunci: <i>Pendidikan Demokrasi;</i> <i>Pemilih Pemula;</i> <i>Kesadaran Politik;</i> <i>Partisipasi Politik;</i> <i>Sekolah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik adalah salah satu pilar utama keberlangsungan negara. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen keempat yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan menganut sistem demokrasi masyarakat Indonesia merasakan kebebasan antara lain:

kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi di depan umum yang sudah dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini selaras dengan konsep demokrasi yang dikemukakan oleh John L. Esposito bahwa demokrasi pada dasarnya kekuatan dan untuk rakyat (Esposito, John L. 1994.). Dengan demikian, maka setiap orang berhak untuk berpartisipasi, baik secara aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lembaga pemerintah resmi adalah pemisahan yang jelas antara unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berangkat dari data-data di atas maka pendidikan demokrasi menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan Demokrasi ini perlu dilakukan di lingkungan sekolah juga karena memungkinkan para siswa untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini telah dibuktikan dengan sejarah bangsa Indonesia. Dimana sejarah menunjukkan bahwa pemuda dan mahasiswa juga selalu menjadi bagian dari pilar demokrasi, sebagai pelopor, penggerak, bahkan pengambil keputusan. Hal ini dibuktikan pada era Sumpah Pemuda 1928, pergerakan 1945, angkatan 1966 yang membidani Tritura, Malari 1974, 1978, dan Reformasi 1998 (Fadhilah dan Nuraiana, 2011: 47). Peran siswa sering kali sebagai pembawa perubahan atau digelar sebagai "*agent of change*". Pemilih pemula, yang umumnya adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024, total jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 204.807.222 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemilih berasal dari generasi muda, yaitu Generasi Z dan Milenial, yang secara keseluruhan mencapai 56,45% dari total pemilih. Secara rinci, jumlah pemilih dari masing-masing generasi adalah sebagai berikut: Generasi Milenial (lahir 1981-1996, usia 27-42 tahun): 68.822.389 pemilih (33,60%). Generasi Z (lahir 1997-2009, usia 14-26 tahun): 46.800.161 pemilih (22,85%). Jika digabungkan dengan Generasi X (lahir 1965-1980, usia 43-58 tahun) yang berjumlah 57.486.482 pemilih (28,07%), maka total pemilih dari kelompok usia 14 hingga 58 tahun mencapai sekitar 84,52% dari total pemilih. Data ini menunjukkan dominasi pemilih muda dalam Pemilu 2024, dengan Generasi Milenial sebagai kelompok terbesar. Hal ini menegaskan peran penting generasi muda dalam menentukan arah masa depan Indonesia melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

SMAK Santo Aloysius Palangka Raya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki perhatian terhadap pendidikan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tampak dalam usaha sekolah untuk mengadakan seminar tentang tema-tema demokrasi yang diadakan setiap menjelang pemilu maupun pilkada. Pada tahun 2024 misalnya SMAK Santo Aloysius dipercayakan menjadi tuan rumah dari kegiatan

KPU *goes to school* provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa SMAK Santo Aloysius berkomitmen untuk mendidik para siswanya untuk belajar mengenal demokrasi dan nilai-nilainya apalagi peserta didiknya 100% tinggal di asrama sekolah. Dengan demikian pendidikan demokrasi sangat bermanfaat bagi kehidupan bersama dalam asrama.

Meski sudah memberikan ruang kepada para siswa untuk mengenal demokrasi serta nilai-nilainya, namun keterlibatan peserta didik dalam pesta demokrasi belum mencapai harapan. Contohnya pada pemilu tahun 2024, 38 siswa kelas XII yang sudah memenuhi syarat usia untuk memilih tidak satu pun yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu jarak TPS terlalu jauh dari asrama yang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya karena siswa-siswi yang bersekolah di SMAK Santo Aloysius berasal dari berbagai daerah pelosok di Kalimantan Tengah. Selain itu, juga disebabkan oleh adanya anggapan bahwa suara siswa-siswi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pemilihan pemimpin.

Berdasarkan data ini maka pendidikan demokrasi sangat penting bagi siswa SMAK untuk mengevaluasi bagaimana pendidikan demokrasi di sekolah dapat menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi sekolah agar dapat merancang program pendidikan demokrasi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa sehingga mereka memiliki kesadaran politik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru PKn dan siswa, serta observasi terhadap pembelajaran PKn, simulasi pemilu, dan kegiatan ekstrakurikuler terkait demokrasi. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan implementasi pendidikan demokrasi dan dampaknya terhadap kesadaran politik siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah mengupayakan demokrasi melalui kegiatan seperti seminar, diskusi, dan program "KPU Goes to School". Nilai-nilai demokrasi juga diterapkan dalam kehidupan asrama melalui pemilihan ketua asrama dan forum musyawarah. Hal ini sesuai dengan pandangan Dewey (1916) bahwa demokrasi

harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak cukup diajarkan secara teoritis. Namun partisipasi politik siswa masih rendah. Pada Pemilu 2024, dari 38 siswa kelas XII yang memenuhi syarat, tidak ada yang menggunakan hak pilihnya. Penyebab utamanya adalah jarak TPS yang jauh dan menganggap bahwa suara mereka tidak berdampak. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan pentingnya partisipasi politik, sebagaimana ditegaskan Dahl (2001) bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang memahami peran dan tanggung jawab politiknya. Keterbatasan informasi dan kurangnya dialog kritis juga menjadi hambatan. Meski begitu, siswa mulai memahami nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan toleransi. Dengan demikian, pendidikan demokrasi di SMAK Santo Aloysius sudah berjalan, namun masih perlu penguatan agar mampu membentuk siswa yang sadar, kritis, dan aktif sebagai pemilih pemula dalam sistem demokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAK Santo Aloysius Palangka Raya telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi bagi para siswanya. Hal ini tercermin dalam pembahasan materi tentang Demokrasi yang dimuat dalam satu Bab. Salah satu contoh nyata adalah keikutsertaan sekolah sebagai tuan rumah kegiatan "KPU Goes to School" pada tahun 2024, yang merupakan bentuk kerja sama antara sekolah dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya hak pilih, proses pemilu, dan peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Selain itu, kehidupan berasrama yang diterapkan di SMAK Santo Aloysius juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar demokrasi melalui mekanisme musyawarah, pemilihan ketua asrama secara langsung, dan forum-forum diskusi internal siswa.

Namun demikian, implementasi demokrasi pendidikan ini belum sepenuhnya berdampak pada partisipasi politik aktif siswa, khususnya dalam konteks pemilu. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pemilu tahun 2024, sebanyak 38 siswa kelas XII yang telah memenuhi syarat usia untuk memilih tidak menggunakan hak pilihnya. Melalui

wawancara dengan siswa dan guru, ditemukan dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi ini. Pertama, faktor geografis dan logistik yang menyulitkan siswa untuk mencapai Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena lokasi sekolah yang cukup jauh dari pusat kota dan terbatasnya akses transportasi. Kedua, adanya anggapan di kalangan siswa bahwa suara mereka tidak akan berdampak signifikan dalam proses pemilu, yang mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran individu dalam sistem demokrasi. Lebih lanjut, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pelaksanaan demokrasi di sekolah. Salah satunya adalah terbatasnya akses terhadap informasi politik yang relevan, mengingat siswa tinggal di lingkungan asrama yang memiliki batasan dalam penggunaan media dan internet. Selain itu, pendekatan demokrasi yang lebih bersifat seremonial melalui seminar, belum sepenuhnya menyentuh dimensi keseharian siswa. Kurangnya pembiasaan untuk berdiskusi secara kritis dan terbuka tentang isu-isu demokrasi juga menyebabkan nilai-nilai demokrasi belum tertanam kuat dalam sikap dan perilaku politik siswa. Meski begitu, wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, dan musyawarah. Nilai-nilai ini mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka di asrama, meskipun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam konteks partisipasi politik formal seperti pemilu. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan demokrasi di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya telah berjalan, namun masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi riil siswa, agar mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami demokrasi secara konseptual, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi sebagai wujud tanggung jawab kewarganegaraan mereka.

B. Pembahasan

Pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik, terutama bagi para pemilih pemula di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan dari pendidikan demokrasi tidak hanya untuk

memberikan pemahaman tentang sistem politik, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang demokratis di kalangan siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan John Dewey (1916) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana utama untuk mempersiapkan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Dewey menekankan pentingnya sekolah sebagai miniatur masyarakat demokratis, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dalam berorganisasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara kolektif.

1. Pendidikan Demokrasi sebagai Landasan Kesadaran Politik

Robert A. Dahl (1989) dalam karyanya *Democracy and Its Critics* menjelaskan bahwa demokrasi dapat berfungsi dengan baik jika warganya memiliki kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi di sekolah harus diarahkan untuk membentuk individu yang memiliki sikap kritis dan partisipatif dalam proses politik. Sejalan dengan pendapat Dahl, Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) dalam *The Civic Culture* menyatakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh budaya politik yang ada di masyarakat. Mereka mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga kategori: parokial, subjek, dan partisipan. Pendidikan demokrasi di sekolah bertujuan untuk mengubah budaya politik siswa. Dari sekadar menjadi subjek pasif, individu diharapkan dapat bertransformasi menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi. Dengan demikian, peran sekolah sangat krusial dalam membentuk karakter siswa agar lebih peka terhadap hak politik mereka dan terlibat dalam proses pemilu.

2. Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula

SMAK Santo Aloysius Palangka Raya telah mengambil inisiatif positif dalam meningkatkan pendidikan demokrasi melalui penyelenggaraan seminar dan program KPU Goes to School. Upaya ini sejalan dengan teori Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, yang menekankan pentingnya pendidikan yang

bersifat dialogis dan membebaskan, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis dan memahami kondisi sosial di sekitar mereka. Dalam konteks ini, seminar dan diskusi politik yang diadakan di sekolah memberikan peluang bagi siswa untuk menyadari pentingnya peran mereka dalam sistem demokrasi. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1976), partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tetapi juga oleh faktor struktural seperti aksesibilitas dan hambatan teknis. Kasus di SMAK Santo Aloysius menunjukkan bahwa kendala geografis dan anggapan bahwa suara mereka tidak berpengaruh menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pemilih pemula. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pendidikan demokrasi, yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada upaya untuk mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi siswa.

3. Strategi Efektif untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan, seperti yang diungkapkan oleh Patrick J. Deneen (2018) dalam bukunya yang berjudul *Why Liberalism Failed*. Ia menekankan pentingnya pendidikan demokrasi yang berlandaskan pengalaman nyata, yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses politik. Oleh karena itu, sekolah-sekolah dapat menyelenggarakan simulasi pemilu atau debat kandidat yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Selain itu, teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky (1978) juga menunjukkan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial mereka. Dalam konteks pendidikan demokrasi, hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti parlementer siswa atau kolaborasi dengan lembaga pemilu.

Dengan demikian, pendidikan demokrasi yang efektif harus mencakup aspek kognitif (pengetahuan politik), afektif (kesadaran dan sikap), serta psikomotorik (praktik langsung dalam

kehidupan demokrasi). Dengan penerapan strategi yang tepat, pendidikan demokrasi di SMAK Santo Aloysius dapat berfungsi sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendidikan demokrasi di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula. Meskipun sekolah telah mengupayakan berbagai kegiatan edukatif seperti seminar dan kerja sama dengan KPU, partisipasi nyata siswa dalam Pemilu 2024 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kendala geografis serta minimnya pemahaman mengenai arti penting suara individu dalam demokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi pendidikan yang hanya bersifat teoritis belum cukup efektif. Berdasarkan teori John Dewey, Robert A. Dahl, Paulo Freire, serta Almond dan Verba, pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang melibatkan siswa secara aktif dan kontekstual dalam lingkungan sosialnya, sehingga dapat membentuk budaya politik partisipatif dan kesadaran politik yang tinggi.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya, beberapa langkah konkret perlu dilakukan. Pertama, sekolah harus menyelenggarakan kegiatan praktik demokrasi seperti simulasi pemilu dan debat OSIS, agar siswa dapat langsung mengalami proses demokrasi. Kedua, sekolah sebaiknya bekerja sama dengan KPU untuk mengadakan program *KPU Goes to School* dan pelatihan kepemiluan bagi siswa. Ketiga, untuk mengatasi kendala geografis, sekolah dapat memfasilitasi perekaman KTP dan menyediakan transportasi ke TPS bagi siswa asrama. Terakhir, menciptakan budaya politik partisipatif di lingkungan sekolah melalui forum musyawarah dan diskusi terbuka akan mendorong siswa untuk lebih aktif dan kritis dalam kehidupan politik. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan demokrasi dapat membentuk siswa yang sadar, peduli, dan aktif dalam berpartisipasi dalam demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Almond, Gabriel Abraham, and Sidney Verba. "The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations." (2015): 1-576.
- DAHL, Robert A. *Democracy and its Critics*. Yale university press, 2008.
- DAHRENDORF, Ralf. *The modern social conflict: An essay on the politics of liberty*. Univ of California Press, 1990.
- DEWEY, J. (1916). *Democracy and education* (pp. 81–98). The Macmillan Company.
- ESPOSITO, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy* (pp. 1–232). Oxford University Press.
- ESPOSITO, John L.; VOLL, John. *Islam. Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1996), 1994.
- FATHUROKHMAN, BENBEN. "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum (Pemilu)." *Journal of Research and Development on Public Policy* 1.1 (2022): 51-59.
- HUNTINGTON, Samuel P.; NELSON, Joan M. *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press, 1976.
- LYNNE, Gary D. Book Review: *Why Liberalism Failed*, by Deneen, P. J. *Journal of Behavioral Economics for Policy*, 2022, 6.1: 47-49.
- SUDIRMAN, H. (2020). *Media Sosial dan Perilaku Politik Pemilih Pemula*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- SURYADI, H. (2007). *Pendidikan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- TILAAR, H. A. R. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Nasional*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- VYGOTSKY, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes (Vol. 86)*. Harvard university press.
- WIJAYA, ILHAM GUMA RASTI. *Analisis Partisipasi Melenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. 2020. Phd Thesis.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.